

WARTA *Pariwisata*



WARTA PARIWISATA
Pusat Penelitian Kepariwisata
Lembaga Penelitian ITB
Villa Merah
Jl. Taman Sari 78, Bandung 40132
Telp./Fax : 2534272 / 2506285
E-mail : p2par@elga.net.id
http://www.p2par.itb.ac.id

Pelindung: Lembaga Penelitian ITB
Penanggung Jawab: Dr. dr. Oerip S. Santoso, M.Sc.
Pemimpin Redaksi: Dr. Ir. Rini Raksadajaya, M.S.A.
Wakil Pemimpin Redaksi: Ir. Wiwien Tribuwani, M.T.
Redaktur Waskita: Yani Adriani, S.T.
Redaktur Winaya & Warita Sekarya: Ir. Andira, M.T.
Redaktur Wacana: Ir. Ina Herliana, M.Sc.
Redaktur Wara-Wiri & Waruga: Rina Priyani, S.T., M.T.
Redaktur Wicaksana: Andhie Wicaksono, S.T.
Layout: Salmon Martana, S.T., M.T.
Bendahara: Novi Indriyanti, S. Par.
Promosi: Neneng Roslita, S.T.
Distribusi: Berty Haryati & Rita Rosita.

Volume V, Nomor 5

OKTOBER 2002

ISSN 1410-7112

WACANA

1 Pengembangan Wisata Bahari yang Berkelanjutan, Manajemen dan Indikator Lingkungan – Wiwik D. Pratiwi

3 Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan – Rina Priyani

4 Jalan-jalan ke Pulau Permukiman Kepulauan Seribu – Salmon Martana

5 Makam Schoemaker dan Potret Buram Apresiasi Masyarakat Terhadap *Urban Heritage* – Salmon Martana

6 Seminar dan Lokakarya *Heritage Interpretation* – Cipto Omarsaid

PENGEMBANGAN WISATA BAHARI YANG BERKELANJUTAN, MANAJEMEN DAN INDIKATOR LINGKUNGAN

Oleh : Ir. Wiwik D. Pratiwi, M.E.S.

Pendahuluan

Tulisan ini dibuat untuk menjadi bahan diskusi tentang usaha pengembangan wisata bahari yang diharapkan bisa menuju ke pengembangan wisata yang berkelanjutan. Di bagian awal dikemukakan sekilas beberapa faktor yang menunjang berkembangnya wisata bahari dan tantangannya untuk keberlanjutan pengembangannya. Selanjutnya diterangkan keterkaitan wisata bahari, ekowisata, dan pariwisata yang berkelanjutan. Aspek-aspek yang dibahas untuk menuju keberlanjutannya adalah kesesuaian sosial, dukungan politik, konservasi lingkungan, dan ekonomi. Pembahasan ini kemudian memperlihatkan pentingnya pengetahuan manajemen lingkungan untuk didalami lebih lanjut. Salah satu cara manajemen lingkungan yang dibahas di bagian akhir tulisan ini adalah indikator lingkungan dengan dua contoh penerapannya di kawasan pantai dan pulau-pulau kecil.

Tumbuhnya wisata bahari dan tantangannya

Beberapa studi menunjukkan bahwa wisata bahari akan terus meningkat dengan berkembangnya hal-hal berikut:

- Tingkat pendapatan yang meningkat
- Tingkat pendidikan yang makin tinggi
- Waktu luang yang bertambah banyak
- Pertumbuhan penduduk
- Akses ke tujuan wisata bahari

yang lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan aman

- Sikap dan cara pandang tentang alam yang berubah
- Makin terasingnya peradaban manusia dari alam karena meningkatnya urbanisasi, dominasi sistem ekonomi dan teknologi
- Lebih nyamannya akomodasi di kawasan wisata bahari dan terjaminnya keterkaitan dengan 'rumah' dengan sistem telekomunikasi.

Dengan meningkatnya pasar wisata bahari, tantangan/kendala untuk keberlanjutan wisata bahari semakin berat karena degradasi atau destruksi kawasan-kawasan wisata bahari yang misalnya disebabkan oleh:

- Jenis pengembangan wisata dan infrastruktur pendukungnya yang tidak layak
- Perusakan obyek daya tarik wisata bahari yang dilakukan oleh wisatawan
- Jumlah wisatawan yang melebihi daya dukung
- Penggunaan kawasan pantai untuk tujuan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutannya, misal: industri, pertambangan, pengembangan kawasan urban, dsb
- Dampak lingkungan dari darat yang merusak aset wisata bahari, misalnya di muara sungai.
- Ancaman-ancaman ini akan

makin meningkat dengan bertambahnya penduduk dunia serta kebutuhan akan 'materi' dan kebutuhan untuk berekreasi.

Wisata bahari, ekowisata, dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan

Pada prakteknya wisata bahari sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan (fisik maupun non-fisik) dan budaya lokal yang sangat terkait dengan lingkungan tersebut. Sulit membuat garis tegas yang membedakan wisata bahari, ekowisata, maupun jenis wisata lain yang berbasis alam (*nature-based tourism*). Walaupun mungkin banyak pengamat menganggap wisata bahari dan ekowisata berseberangan dengan usaha-usaha konservasi alam, tapi kenyataannya pengembangan wisata membuat kebijakan yang hampir sama dengan usaha konservasi, misalnya di Kepulauan Seribu, menekankan untuk tidak merusak sumber daya alam karena daya tarik wisatanya sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam ini.

Dari 110 pulau yang berada di Kepulauan Seribu, 35 di antaranya termasuk dalam gugus pulau-pulau wisata dengan penggunaan utama untuk rekreasi dan pariwisata/peristirahatan. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Seribu menyebutkan bahwa khusus untuk pulau-pulau peruntukan cagar alam pada zona pemanfaatan dan penyangga diberlakukan ketentuan yang lebih ketat dibandingkan dengan pulau-pulau lain agar terumbu karangnya tidak rusak. Kegiatan wisata terbatas yang diijinkan di pulau-pulau ini adalah aktifitas olahraga perairan, rekreasi pantai yang tidak mengganggu habitat ikan hias, terumbu karang, tidak mengambil patahan-patahan karang atau benda lain sebagai suvenir, dan kegiatan berkemah yang tidak merusak vegetasi pulau. Sedangkan pemanfaatan ruang gugus pulau wisata di Kepulauan Seribu menyebutkan bahwa pengembangan kawasan sebagai pusat pariwisata harus didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan dan perhubungan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian cagar budaya. Ilustrasi di atas memperlihatkan pentingnya penekanan konservasi lingkungan untuk kegiatan wisata di pulau-pulau kecil dan kawasan bahari umumnya.

Para pemerhati ekowisata menerapkan batasan-batasan lebih lanjut agar suatu usaha pengembangan wisata dapat termasuk dalam klasifikasi ekowisata, misalnya: perlu adanya pendidikan lingkungan sebagai bagian dari kegiatan wisata (Boo 1990), harus memberikan keuntungan ekonomi bagi penduduk setempat (Ziffer 1989). Bila wisata bahari akan dikembangkan dalam konteks ekowisata, usaha-usaha pengembangan wisata bahari selanjutnya juga memikirkan upaya pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal.

Konsekuensi lanjut dari dua batasan di atas, misalnya pendidikan lingkungan dapat menjadi cara yang tepat untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini bisa ditujukan untuk *tour-operators* dan/atau untuk wisatawan, misalnya bagaimana bersikap dan berperilaku yang tidak merusak lingkungan. Sementara itu, penting untuk mengupayakan agar penduduk lokal memperoleh keuntungan dari pengembangan wisata dan mempertinggi pengetahuan penduduk tentang pengelolaan lingkungan sebagai daya tarik wisatanya. Tanpa ini, penduduk tidak memiliki insentif untuk memelihara lingkungan daya tarik wisatanya, dan kemungkinan dapat timbul konflik yang tidak diinginkan.

Dalam diskusi-diskusi tentang ekowisata atau pembangunan berkelanjutan pada umumnya, ada sangat beragam pendapat tentang bagaimana menyeimbangkan konservasi dan pengembangan wisata yang paling cocok untuk suatu destinasi, demikian juga untuk destinasi wisata bahari. Di satu sisi, batasan-batasan konservasi dibuat sangat longgar, misalnya batasan ekowisata adalah kegiatan wisata yang 'baik untuk lingkungan' atau 'diinginkan oleh semua pihak,' jadi batasan ini bersifat normatif. Di sisi lain, batasannya dibuat sangat ketat, misalnya berdasarkan teori-teori *deep-ecology*, sehingga memberi peluang kecil sekali untuk bisa mengembangkan pariwisata di destinasi yang bersangkutan. Dua sisi ini bisa saja sangat berseberangan dan berkonflik. Tulisan ini mencoba melihat fenomena kegiatan pariwisata (khususnya wisata bahari) yang komplementer dengan usaha konservasi atau usaha pembangunan berkelanjutan di kawasan bahari. Bagaimana pun akan bisa dilakukan usaha-usaha untuk mengembangkan wisata bahari di Indonesia yang mempunyai nilai positif terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan

Dengan pengantar di atas, cukup jelas bahwa, pada tataran teori, topik-topik bahasan dalam pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan tidak jauh berbeda dengan pengembangan (eko-)wisata berkelanjutan pada umumnya. Banyak perbedaan pendapat tentang apakah wisata yang berkelanjutan bisa menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dan aspek apa saja yang bisa digunakan untuk menjamin keberlanjutannya. Pembahasannya biasanya berkisar pada aspek-aspek berikut:

Kesesuaian sosial

Pengembangan wisata bahari akan menimbulkan masalah bila kemudian membatasi akses atau penggunaan sumberdaya alam yang sebelumnya sudah biasa digunakan penduduk setempat. Banyak diskusi tentang

Bersambung ke hlm. 7

WACANA

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

Oleh: Rina Priyani, S.T., M.T.

“Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat”
(Piagam Pariwisata Berkelanjutan, 1995)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan (1995) adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Artinya, pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.

Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai ‘resep’ pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan Para Pelaku/*Stakeholder Involvement*

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan Lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan Sumber daya yang berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat

Bersambung ke hlm. 12

WARA WIRI

JALAN-JALAN KE PULAU PERMUKIMAN DI KEPULAUAN SERIBU

Oleh: Salmon Martana, S.T., M.T.

Jalan-jalan ke Pulau Seribu? Ah, sudah biasa. Mungkin demikian komentar orang, yang sering berwisata atau berekskursi ke jajaran pulau-pulau wisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tapi jalan-jalan ke pulau permukiman yang kebanyakan ditempati keluarga-keluarga nelayan? Nanti dulu. Ternyata tidak banyak yang pernah melakukannya. Jarak yang lumayan disertai dengan sulitnya moda transportasi serta akomodasi mungkin yang menjadi kendala. Saya mungkin termasuk yang beruntung dapat merasakannya.

Senin pagi, 30 September 2002 rombongan kami berangkat dari Bandung menggunakan mobil carteran menuju Marina, Ancol. Perjalanan yang cukup menyenangkan karena bebas dari kemacetan yang biasanya menyiksa jalur Bandung-Jakarta. Aroma udara segar di jalur puncak juga cukup menolong membebaskan pikiran dari segala keruwetan kota Bandung yang kian hari kian semrawut itu. Hanya saja, kesemrawutan itu akhirnya terasa lagi setelah memasuki Jakarta.

Tengah hari kami tiba di Marina.

Aroma laut langsung terasa ketika mendekati bibir pelabuhan. Pemandangan laut yang biru dengan ombak memukul pantai rasanya cukup membawa kesejukan di hari yang terik itu. Kapal Bandar Jakarta I yang sedianya akan membawa kami ke pulau Seribu, dijadwalkan datang pukul 13.30 WIB, jadi sebelum waktunya tiba kami sempat mencicipi makan siang terlebih dahulu.

Ternyata kapal yang ditunggu mulur kedatangannya. Para calon penumpang yang kebanyakan terdiri atas pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terlihat mengisi waktu dengan duduk-duduk menikmati makanan ringan di tepi dermaga. Namun, rupanya siang itu angin bertiup dengan kencang sehingga gelombang lautpun makin lama makin deras. Beberapa kali cipratan air naik hingga ke lokasi calon penumpang duduk sehingga terdengar keluh kesah beberapa orang yang kuaah basonya menjadi lebih asin karena tercampur air laut.

Terlambat satu jam, Kapal Bandar Jakarta I nampak dari kejauhan, melalui teropong seorang calon penumpang. Sekitar

pukul 14.35 WIB rombongan besar kami meninggalkan Marina menuju Pulau Pramuka, salah sebuah dari 11 pulau permukiman di Kepulauan Seribu. Sebuah perjalanan yang cukup menyenangkan. Kapal Bandar Jakarta I melaju di atas ombak dengan pemandangan di kanan kiri laut membentang. Pada jarak-jarak yang dekat dengan pulau lain dapat kita saksikan burung-burung laut yang bergerak mencari makanan.



Dermaga di Pulau Pramuka yang elok dan permai.



Penangkaran Penyu di pulau Pramuka

2 jam perjalanan lebih dibutuhkan untuk mencapai pulau Pramuka. Kami disambut pemandangan dermaga yang asri diiringi ramah mentari yang pulang ke peraduannya. Di pulau-pulau permukiman tidak terdapat *homestay* atau losmen. Namun rupanya untuk melewatkan malam saya tidak terlalu khawatir karena penerimaan penduduk setempat yang begitu terbuka.

Malamnya, bersama Pak Ajis Adjmain, tokoh masyarakat setempat, saya berkeliling pulau Pramuka. Pulau-pulau di Kepulauan Seribu kebanyakan berukuran kecil sehingga terasa bagaikan sebuah kapal yang tengah berlayar di tengah lautan. Pulau Pra-

muka sendiri hanya berukuran 16 hektar, kira-kira seukuran perumahan kecil di kota besar. Sungguh suatu nuansa yang berbeda dengan pantai-pantai lain, yang biasanya hanya berorientasi satu arah. Di Kepulauan Seribu, kemanapun kita memandang, ke depan terlihat laut, ke belakangpun demikian. Kira-kira dibutuhkan waktu setengah jam untuk memutar pulau tersebut di waktu malam. Saya sempat menikmati pemandangan di dermaga yang elok, dihiasi kapal-kapal nelayan yang sesekali hilir mudik ditingkahi kerlap-kerlip lampu rumah penduduk di pulau lain di kejauhan.

Pulau Pramuka, merupakan pulau tempat pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sarana penting yang terdapat di sini meliputi Kantor Bupati serta SMU yang hanya satu-satunya di seluruh kepulauan berjumlah 110 pulau tersebut. Dikarenakan murid-murid sekolahnya berdatangan dari pulau-pulau yang relatif berjauhan maka di dekat gedung sekolah, di tengah-tengah pulau disediakan asrama putra dan asrama putri. Juga terdapat sekolah TK, SD hingga

Bersambung ke hlm. 9

WACANA

MAKAM SCHOEMAKER DAN POTRET BURAM APRESIASI MASYARAKAT TERHADAP *URBAN HERITAGE*

Oleh: Salmon Martana, M.T.

Akhir Juli 2002 lalu, surat kabar-surat kabar nasional diramaikan oleh sebuah berita mengejutkan, berupa ditemukannya makam Prof. Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker. Makam yang terletak di Blok CB Kelas I No. 1086 Pemakaman Kristen Pandu Bandung tersebut sudah dalam keadaan yang menyedihkan, tersingkir dari perhatian, dan sudah akan digusur karena 9 tahun retribusinya tidak terbayarkan. Saking terkucilnya makam tersebut sampai-sampai putri Schoemaker, Lucy yang berusia 92 tahun, tidak dapat menemukan makam ayahnya tersebut kala berkunjung ke Bandung untuk berziarah.

Semenjak berita tersebut tersiar, berlomba-lombalah orang untuk menanganai dan melunasi retribusi yang tertunggak tersebut. Tidak kurang dari Guruh Sukarno Putra turut dalam “perlombaan” ini, dengan alasan Schoemaker adalah guru ayahnya di ITB, yang berbuat banyak bagi sang proklamator tersebut. Perlombaan ini akhirnya dimenangi oleh seorang dermawan yang tidak disebutkan namanya.

Namun, permasalahannya rupanya tidak berhenti di situ. Siapapun yang jeli, akan dapat berkaca dari dan mengambil hikmah dari peristiwa ini. Hampir sebagian besar masyarakat kota Bandung tidak mengetahui letak makam Schoemaker, atau bahkan yang lebih ironis, tidak mengetahui siapakah Wolff Schoemaker. Suatu pertanyaan yang kemudian dapat dilanjutkan dengan ironi berikutnya, jika Schoemaker yang telah berbuat begitu banyak bagi kota Bandung, tidak dikenali keberadaannya bahkan oleh masyarakat kota Bandung, bagaimanakah dapat diharapkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat akan *heritage* yang dimilikinya?

Pelestarian *heritage* pada dasarnya bukan hanya secara sempit meliputi pelestarian bangunan tua berumur di atas 50 tahun seperti yang diatur oleh undang-undang, namun lebih luas daripada itu, merupakan upaya pelestarian informasi-informasi penting dari masa lampau, untuk digunakan sebaik-baiknya oleh generasi setelahnya di masa depan. Suka atau tidak, Schoemaker dan sederetan bangunan-bangunannya di Bandung, Jakarta dan Surabaya merupakan informasi yang sangat berharga, baik ditilik dari segi perkembangan kota maupun perkembangan langgam arsitektur di Indonesia.

Pengembangan *Heritage Tourism*

Heritage Tourism, khususnya berkaitan dengan arsitektur, merupakan salah satu varian dari wisata budaya, yang kini tengah coba dikembangkan di kota-kota besar di Indonesia, terutama bagi kota dengan memiliki sejarah budaya panjang. Termasuk dalam kota-kota tersebut adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang serta beberapa kota lainnya. Kota-kota tersebut memiliki kekayaan budaya berupa arsitektur zaman kolonial yang kondisinya hingga kini masih dapat dikatakan cukup baik.

Bangunan-bangunan tua yang berumur lebih dari 50 tahun tersebut, pada dasarnya dilindungi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 mengenai Benda Cagar Budaya. Sayangnya, pada prakteknya pemeliharaan bangunan tua sangat berlainan halnya, dengan bangunan-bangunan baru yang dibangun pada masa sekarang. Selain sulit dikarenakan struktur dan konstruksinya telah termakan usia, sarana pendukung utilitas yang tidak lagi sesuai zaman sehingga harus diadakan penyesuaian, biaya yang dibutuhkan juga lebih mahal daripada bangunan umum sejenis dengan umur yang lebih muda.

Oleh sebab itu, walaupun bangunannya dilindungi undang-undang, terkadang pemilik bangunan mencaricari celah agar bangunan tersebut dapat dirobohkan dan diganti dengan yang baru. Atau dalam praktek lain, bangunan tersebut dibiarkan saja terlantar, lapuk dan akhirnya tumbang dengan sendirinya. Kasus yang lebih ekstrim terjadi pada Gedung Singer, gedung indah karya Brinkman di simpang lima Bandung. Setelah sempat selamat dari pembongkaran, beberapa hari kemudian terjadi “kerusakan” sehingga bangunan tersebut dinilai konstruksinya berbahaya bagi keselamatan, sehingga akhirnya dibongkar juga. Suatu kerugian bagi kekayaan budaya kota, namun merupakan kemenangan ekonomi yang memang dari sudut manapun jauh lebih superior.

Hal-hal diatas tersebut, merangsang terbitnya wacana mengenai *heritage tourism*. Kekayaan budaya ini dapat lestari jika didukung dana yang cukup besar, dan pariwisata sudah terbukti merupakan generator finansial yang baik dan dapat diandalkan. Menempatkan kawa-

Bersambung ke hlm. 10

WARITA SEKARYA

SEMINAR DAN LOKAKARYA heritage interpretation

Illuminating Our Past For Our Future
Bandung, 19—20 Agustus 2002

Oleh: Cipto Omarsaid

Interpretasi adalah bercerita/*telling stories* (Anne Warr) tentang apa saja. Jika dituang dalam konteks pariwisata, berarti suatu usaha untuk menceritakan segala sesuatu yang dirasakan oleh wisatawan selama berwisata. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perjalanan wisata dengan memahami makna atas segala sesuatu yang dirasakan.

Kualitas interpretasi mempengaruhi kualitas objek yang berdaya tarik wisata, atau menjadi daya tarik wisata. Dengan kata lain, interpretasi memiliki nilai ekonomi karena menciptakan nilai tambah terhadap sebuah objek.

Pusat Penelitian Kepariwisata Institut Teknologi Bandung (P2Par – ITB) bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Barat (DISBUDPAR JABAR), pada tanggal 19-20 Agustus 2002 di Aula Timur – ITB, mengadakan **Seminar & Lokakarya *Heritage Interpretation Illuminating Our Past For Our Future***. Tujuan seminar dan lokakarya ini adalah untuk menggugah insan pariwisata dan budaya untuk menyiapk an dan menyelenggarakan program interpretasi di semua objek dan daya tarik serta komponen pariwisata dan budaya Nusantara. Seminar ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran insan pariwisata dan budaya terhadap pentingnya interpretasi dalam kegiatan wisata, terbentuknya komunikasi formal dan informal tentang pengembangan interpretasi antar *stakeholder* di bidang kepariwisataan dan peningkatan pengetahuan tentang berbagai aspek pengembangan program interpretasi. Sedangkan kegiatan lokakarya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan kapasitas setiap ‘insan’ pariwisata dan budaya Jawa Barat dalam pengembangan interpretasi, komitmen antar *stakeholder* untuk bekerja sama mengembangkan produk-produk pariwisata yang sarat makna (*meaningful tourism product*) yang berarti produk pariwisata berbasis pengetahuan (*knowledge-based tourism product*), serta terbentuknya rancangan awal mengenai pengembangan

awal program interpretasi bidang Kepariwisata di Jawa Barat.

Kegiatan ini mengikutsertakan para ahli dan praktisi yang terlibat dalam interpretasi, diantaranya Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh Bapak I Gusti Ngurah Anom (Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata), Anne Warr (*International Council on Monuments and Sites – ICOMOS- Australia*), John M. Daniels (PATA Bali Chapter/Bali), Rini Raksadjaya (Pusat Penelitian Kepariwisata – ITB), Amir Sidharta (Museum Seni Universitas Pelita Harapan), dan Soehartini Sekartjajarini (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam). Sesuai dengan tujuannya, seminar ini menengahkan topik-topik seperti filosofi interpretasi, *Business of Interpretation*, Interpretasi: Teknologi dan Aplikasi, Interpretasi Warisan Alam dan Budaya Indonesia sebagai Sumber Daya Pariwisata.

Fasilitator yang dilibatkan meliputi Frances B. Affandy, Harastoety D. Hartono (Bandung *Heritage*) dan Hilwan Saleh (PT Panghegar). Untuk kegiatan Lokakarya, telah

melibatkan Rini Raksadjaya, Harastoety D. Hartono, Frances B. Affandy dan Taufik Rahzen (Galeri Taman Budaya Jawa Barat) sebagai fasilitator yang mendampingi peserta dalam tiap kelompok kerja. Kelompok kerja ini terbagi berdasarkan minat dan keahlian dengan topik “peran *stakeholder* dalam pengembangan interpretasi”. Kelompok kerja yang ada ada adalah *The Natural Heritage (Cultural Landscape)*, *The Moveable Heritage: Museum, Sites and Monuments*, dan *Cultural Events & Performances*.

84 peserta hadir untuk mengikuti kegiatan seminar, dengan latar belakang profesi yang beragam seperti dari dinas pariwisata Propinsi Jawa Barat dan dari luar Jawa Barat, dinas pariwisata kabupaten dan kota di Jawa Barat, lembaga pendidikan, pengelola objek dan daya tarik wisata, serta individu yang kompeten.



John Daniels dalam salah satu sesi *Heritage Interpretation*

WACANA**DARI HLM. 2 PENGEMBANGAN WISATA BAHARI YANG BERKELANJUTAN...**

partisipasi lokal baik dalam tataran teoretis maupun pelaksanaan telah dikembangkan untuk hal ini. Penetapan kawasan atau tapak sebagai destinasi wisata atau pun konservasi perlu mendapat dukungan dari penduduk lokal. Kasus-kasus pengembangan kawasan pantai di Bali, misalnya, banyak menimbulkan konflik karena akses penduduk ke pantai yang merupakan bagian dari ritualnya terganggu. Areal di sekitar Pura Dalem yang diperlukan untuk mengelilingi Pura saat ritual-ritual tertentu agama Hindu juga terganggu karena tanahnya digunakan untuk membangun fasilitas penunjang wisata.

Dukungan politik

Dukungan politik dan *lobby groups* yang mendukung pengembangan wisata bahari yang seiring dengan konservasi lingkungan bahari diperlukan keberadaannya agar wisata yang dikembangkan sesuai dengan usaha-usaha konservasi. Suatu kawasan yang banyak diminati industri wisata untuk dikembangkan biasanya memerlukan ‘rambu-rambu’ atau kesepakatan aturan-aturan supaya arah pengembangannya tidak eksploitatif terhadap lingkungannya dan memperhatikan batasan-batasan ekowisata. Perangkat politik bisa menjadi salah satu cara efektif untuk menjamin pengembangan dengan memperhatikan konservasi, misalnya peraturan pemerintah daerah, peraturan dari asosiasi profesional, peraturan dan kontrol dari institusi di tingkat internasional.

Konservasi lingkungan

Pengembangan wisata bahari bisa memberikan profit untuk konservasi lingkungan tetapi juga bisa memperburuk kondisi lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya. Bila tidak diantisipasi makin lama bisa membuat lingkungan tidak atraktif lagi bagi wisatawan. Ada banyak teknik-teknik manajemen lingkungan dan kebijakan lokal yang bisa dipakai untuk mengantisipasi hal ini. Urgensi mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkenaan dengan hal ini tergantung besarnya jumlah wisatawan yang datang dan daya dukung lingkungan kawasan yang bersangkutan.

Ekonomi

Pengembangan wisata bahari akan berlanjut bila menguntungkan *tour-operators*. Dalam dunia yang didominasi oleh ekonomi, kemampuan membuat profit perlu dipikirkan dengan baik. Banyak dijumpai kasus operator-ekowisata yang perlu disubsidi supaya usahanya dapat berlanjut. Dengan banyaknya sikap skeptis terhadap pengembangan wisata, subsidi untuk operator-ekowisata dari badan-badan internasional makin sulit diperoleh. Akan tetapi, justifikasi konservasi dan manajemen lingkungan sebagai sumberdaya ekowisata ser-

ing lebih bisa diterima, misalnya untuk taman nasional, cagar alam dan budaya. Pihak yang diuntungkan dengan konservasi ini tidak hanya wisatawan, tetapi juga mereka yang tidak ke lokasi tetapi memperoleh keuntungan dari kekayaan hayati dan budaya kawasan konservasi ini.

Perlu tidaknya subsidi untuk pengembangan eko- dan wisata bahari memang bisa diperdebatkan. Tetapi bila suatu kawasan bisa dikembangkan sebagai wisata bahari yang edukatif dan makin memperbesar simpati wisatawan pada konservasinya, selanjutnya bisa jadi akan memperbanyak dukungan politis untuk preservasi lingkungannya dan bisa menjadi sistem kontrol untuk pengembangan wisatanya yang lebih memperhatikan konservasi.

Manajemen dan indikator lingkungan wisata

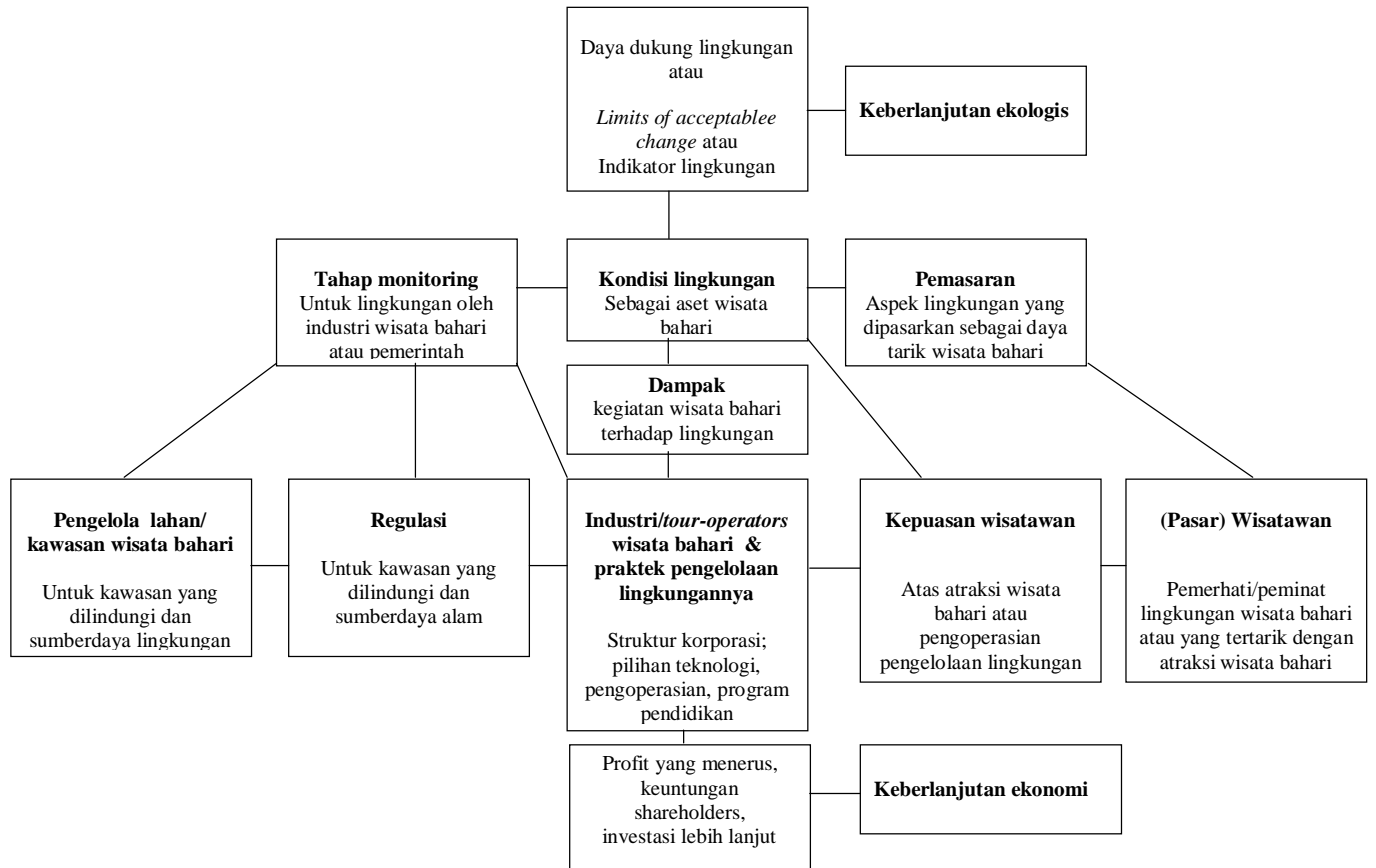
Dari pembahasan upaya-upaya untuk menjamin keberlanjutan pengembangan eko- dan wisata bahari di atas, dapat dimengerti pentingnya manajemen sumber daya alam dan budaya sebagai suatu pengetahuan dasar yang perlu dipahami. Banyak studi telah dilakukan untuk makin mempermudah pelaksanaan pembangunan wisata (bahari) yang juga menjamin konservasi lingkungan dan secara lebih luas untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*ecological and economic sustainability*), diagram pada halaman berikut dapat memberi gambaran tentang hubungan pengembangan wisata bahari dan lingkungan (alam-budaya) atau hal-hal apa saja yang perlu dipikirkan untuk menjamin keberlanjutannya pengembangannya.

Pengetahuan tentang analisis dampak lingkungan sudah dikembangkan sejak lama. Di Indonesia, regulasi dan pengoperasiannya bahkan sudah menjadi pemikiran di tingkat nasional. Demikian juga, para akademisi telah mengembangkan konsep-konsep daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) yang sudah dirinci menjadi: daya dukung fisik, daya dukung ekologis, dan daya dukung sosial. *Limits of acceptable change* merupakan turunan terakhir dari konsep daya dukung yang diharapkan mampu menjawab kekurangan-kekurangan dalam implementasi konsep daya dukung. Diskusi-diskusi di lingkungan akademis selanjutnya, membuah konsep indikator lingkungan yang dikembangkan untuk menjadi perangkat terwujudnya keberlanjutan pembangunan wisata, termasuk wisata bahari.

Indikator lingkungan, salah satu perangkat manajemen lingkungan yang dikembangkan untuk memberi ‘warning’ pada pihak-pihak yang memiliki perhatian untuk keberlanjutan pengembangan wisata di suatu kawasan, misalnya pengambil keputusan atau pengelola

kawasan wisata bahari. Indikator lingkungan biasanya digunakan untuk memilih informasi yang diperlukan di suatu daerah/kawasan agar tidak memutuskan hal yang kurang benar bagi keberlanjutan wisata. Dengan demikian perlu ditetapkan dulu ‘untuk apa’ informasi tentang lingkungan ini perlu dipilih.

ola atau pengambil keputusan dalam menentukan pengembangan kegiatan wisatanya dan kapasitas lingkungan untuk meneruskan kegiatan wisata ini. Indikator ini biasanya terukur, misalnya: jumlah atau luas, pertumbuhan atau perubahan yang kuantitatif.



Indikator mana yang relevan dengan pengambil keputusan atau pengelola di tingkat mana sangat tergantung pada karakteristik destinasi wisata dan sejauh mana karakteristik ini dipandang penting oleh wisatawan. Sebagai contoh, bila tujuan utama pengembangan suatu kawasan wisata adalah untuk melestarikan lingkungan bahari dengan ekosistem tertentu sehingga dapat terus menarik pengunjung (misalnya untuk menyelam), maka indikator utamanya adalah hal-hal yang bisa diukur untuk melihat usaha pelestariannya atau angka/nilai berkurangnya (spesies, ekosistem) di kawasan bahari tersebut yang seharusnya dilestarikan. Contoh yang lain, bila tujuan utamanya adalah memperlambat pengurangan kualitas lingkungan (misalnya pantai), maka indikator utamanya akan berkaitan dengan (1) tingkat penggunaan, kondisi kritisnya saat dampak pengunjung sudah terlihat pada lingkungan biologis atau budaya setempat, atau (2) kecenderungan pengunjung yang tidak ingin datang kembali.

Dengan demikian untuk keberlanjutan wisata suatu kawasan, indikator-indikator ini akan membantu pengel-

Beberapa persyaratan untuk suatu indikator yang ideal, yaitu:

- Mudah diidentifikasi dan diukur
- Berguna untuk ekosistem tertentu
- Mempunyai nilai yang tinggi (secara budaya, sosio-politis, dan ekonomi)
- Relatif tidak mudah berubah
- Memerlukan tingkat teknologi yang ‘rendah’
- Tepat dengan pertanyaan yang ingin dicari jawabannya
- Memiliki mekanisme yang responsnya bisa dimengerti
- Cepat tanggap terhadap respons
- Ketidakpastiannya rendah

Halaman berikut memberi contoh indikator yang dikembangkan untuk pengembangan wisata di kawasan pantai dan pulau-pulau kecil yang diadaptasi dari panduan yang dikeluarkan oleh World Tourism Organisation (1996).

Indikator lingkungan di kawasan pantai

Topik perhatian	Indikator	Yang diukur
Perusakan ekologis	Besarnya kerusakan lingkungan	% kondisi kerusakan
Degradasi pantai	Tingkat erosi	% erosi pantai
Jumlah ikan menurun	Berkurangnya tangkapan ikan	Usaha penangkapan ikan Jumlah spesies ikan tertentu yang tertangkap
Kepadatan pengunjung	Kepadatan pemakaian pantai	Satuan luas pantai tiap wisatawan/pengunjung
Berkurangnya fauna tertentu (misal ikan paus, lumba-lumba)	Penghitungan spesies	Jumlah spesies yang terhitung Perubahan komposisi spesies Jumlah spesies tertentu yang bisa terlihat wisatawan
Kualitas air menurun	Tingkat polusi	Komposisi kimia air
Keamanan	Tingkat kriminalitas Tingkat kecelakaan	Jumlah kegiatan kriminal yang dilaporkan Perbandingan kecelakaan terhadap populasi wisatawan

Indikator lingkungan di pulau-pulau kecil

Topik perhatian	Indikator	Yang diukur
Tingkat kepemilikan oleh pihak asing yang tinggi	Nilai kepemilikan oleh pihak asing	% kepemilikan asing terhadap fasilitas wisata keseluruhan
Kepadatan fasilitas wisata	Kepadatan pemakaian lahan dan dampak sosialnya	Angka kepadatan dan unit analisis lain untuk dampak sosial
Kurangnya peluang kerja untuk lokal	Peluang kerja wisata untuk penduduk lokal	% pekerjaan yang berhubungan dengan wisata % pekerjaan musiman untuk wisata
Kurangnya air bersih	Ketersediaan air bersih	Volume air yang digunakan wisata dibandingkan dengan penduduk lokal per kapita Biaya penyediaan air Biaya penyediaan air tiap wisatawan Perkiraan kapasitas (volume yang ada di reservoir)
Kurangnya listrik	Ketersediaan listrik	Besarnya daya listrik yang tersedia Besarnya daya listrik yang dibutuhkan tiap wisatawan
Sampah	Fasilitas pengolahan sampah	Volume sampah yang diolah Tingkat pengolahan sampah

WARA WIRI

DARI HLM. 4 JALAN-JALAN KE PULAU...

SMP hingga di pagi hari di jam sekolah suasananya sebenarnya tidaklah jauh berbeda antara di “pulau” dengan di “darat”. Di ujung utara pulau terdapat bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, yang menyediakan daya listrik secara terbatas antara pukul 09.00 – 15.00 dan 17.00 – 07.00.

Pada keesokan harinya pagi-pagi benar saya dibangunkan oleh suara orang berjualan. Rusli, siswa dari asrama putra yang turut mendampingi saya di pulau Pramuka, memberi tahu saya bahwa suara tersebut berasal dari penjual *semarmesem*, jajanan khas “orang pulau”. Lumayan untuk sarapan pagi, jajanan itu berupa kue ketan goreng dengan isi daging ikan cincang, berukuran sekitar tigaperempat bola tenis.

Kenyang oleh sarapan khas pulau tersebut, saya memutar pulau tersebut sekali lagi, untuk melihat-lihat apa yang terlewat semalam. Saya menjumpai sebuah penangkaran penyu di bagian dalam pulau yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Menyenangkan menyaksikan penyu berbagai ukuran berenang-renang di dalam bak penampungan. Sayangnya sedang tidak ada acara pelepasan penyu ke laut. Menurut cerita penduduk setempat, Helmut Scholl dan Suharto, -kalah itu menjabat Kanselir Jerman dan Presiden RI- pernah turut melepas penyu-penyu kembali ke habitatnya.

Tepat di depan penangkaran penyu tersebut terdapat pohon-

Bersambung ke hlm. 11

WACANA

DARI HLM. 5 MAKAM SCHOEMAKER DAN POTRET...

san-kawasan lama, bangunan-bangunan tua sebagai objek wisata juga bukan merupakan wacana baru. Miami dan Singapura misalnya, cukup berhasil melakukannya dengan potensi yang sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang kita miliki. Singapura melalui *Singapore Tourism Board* lebih unik lagi, mengemasnya dengan bentuk hiburan modern, suatu *theme park* yang terintegrasi antara atraksi wisata dalam lingkungan klasik *Chinatown* dan *little India*.

Semua keberhasilan di atas, menuntut adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat, perihal “harta karun” yang mereka warisi tersebut. Tanpa adanya kesadaran masyarakat, rasa memiliki warga, semua dukungan baik dari pemerintah maupun swasta tentulah tidak akan mencapai hasil yang optimal. Peristiwa makam Schoemaker di atas, telah menyadarkan para pencinta kota dan calon-pengembang wisata *heritage*, bahwa kepedulian masyarakat terhadap kota dan warisannya harus lebih meningkat, diperlukan upaya lebih untuk pendidikan masyarakat agar lebih apresiatif terhadap aspek-aspek historis dari kotanya. Pendidikan ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan media-media yang kini sudah tidak menemukan kesulitan lagi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Diharapkan, dengan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya kotanya, akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya *heritage tourism*, baik ditilik dari segi timbulnya keinginan untuk berwisata, atau sebaliknya, kesiapan kolektif menerima kunjungan wisatawan *heritage* yang digolongkan pada wisatawan minat khusus tersebut.

Sekilas mengenai Wolff Schoemaker

Tidak seperti arsitek-arsitek terkenal Belanda lainnya yang berkiprah di Indonesia dan khususnya pulau Jawa di paruh pertama abad 20 seperti E.H. de Roo, Thomas Karsten, Henri Maclaine Pont dan J. Gerber yang kesemuanya merupakan ahli bangunan sipil tamatan *Technische Hoogeschool te*

Delft Belanda, Wolff Schoemaker arsitek kelahiran Ambarawa ini sesungguhnya pada awalnya adalah seorang ahli bangunan militer lulusan Akademi Militer bagian zeni di Breda Belanda.

Ia kembali ke tanah kelahirannya Pulau Jawa tahun 1905, sebagai seorang tentara di korps zeni dengan pangkat Letnan. Tidak mengherankan jika kebanyakan bangunan yang ditangani oleh Wolff Schoemaker di

masa-masa awal karirnya di Indonesia, merupakan bangunan militer atau setidaknya terletak di seputar kompleks militer. Contoh-contoh bangunan tersebut adalah gedung SMUN 3 dan SMUN 5 di Jalan Belitung, Gedung Kodam Siliwangi dan Gedung Kologdam di Jalan Aceh. Pada saat itu, kompleks militer di Bandung memang dikenal sebagai *Archipelwijk* atau Lingkungan Nusantara, karena jalan-jalannya dinamai sesuai nama pulau-pulau di Kepulauan Hindia Belanda.

Semenjak awal abad 20 memang daerah Bandung telah disiapkan untuk menjadi sentral militer Hindia Belanda, semacam Pusat Komando Angkatan Perang. Untuk itulah pemerintah kemudian mengadakan mobilisasi militer secara besar-besaran. Pabrik mesiu dipindahkan dari Ngawi ke Kiaracandong Bandung, demikian pula pabrik senjata dari Surabaya. Pembangunan Bandung dan sekitarnya menjadi Pusat Komando Militer yang dilakukan dibawah pimpinan Letnan Kolonel Korps Zeni V.L. Slors ini nampak sekali bukan pekerjaan main-main, terbukti dari hampir setengah kekuatan militer Hindia Belanda kemudian terpusat di Bandung. Mobilisasi militer secara besar-besaran inilah yang kemungkinan membawa Letnan Korps Zeni Wolff Schoemaker muda ke kota Bandung.

Tahun 1917, Wolff Schoemaker berangkat ke Amerika Serikat, di mana ia menyempatkan diri mempelajari karya-karya Frank Lloyd Wright. Sepulang dari kunjungan singkat ke Chicago (yang nantinya berpengaruh besar pada desain-desainnya), ia mendirikan biro tekniknya sendiri di Bandung, *C.P. Schoemaker en Associatie* dan mulai berpraktek profesional. Mulai saat itu, karya-karyanya ditandatangani dengan nama Charles Wolff Schoemaker. Nama Wolff diambil dari nama keluarga ibunya semasih gadis, sesuatu hal yang lazim di masa itu. Schoemaker agaknya dengan jeli melihat peluang untuk dapat berkiprah sebagai arsitek profesional, menimbang setahun setelahnya yaitu tahun 1918, Bandung ditetapkan oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum, penguasa tertinggi daerah Hindia Belanda, sebagai calon ibukota Hindia Belanda yang baru menggantikan Batavia. Pemindahan ibukota tentulah menuntut banyak bangunan baru didirikan sebagai sarana penunjang aktifitas. Di sinilah Wolff Schoemaker berperan sebagai seorang arsitek yang disegani pada masa itu.

Tahun 1922 Schoemaker diangkat menjadi guru besar di T.H. Bandoeng (sekarang ITB). Tahun itu pula ia berkenalan dengan mahasiswa favoritnya, Raden Su-

karno yang kelak menjadi Presiden RI pertama. Bersama Sukarno, Schoemaker sempat mengerjakan desain Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, serta salah sebuah *masterpiecenya*, bangunan Hotel Preanger di Jalan Asia Afrika yang agak “berbau” Frank Lloyd Wright. Peran Schoemaker dalam kehidupan Sukarno cukup besar. Ketika Biro Teknik yang didirikan Sukarno terus merugi karena “cacat politik”nya, Schoemaker membagi beberapa borongan untuk kelangsungan keputihan asap dapur Sukarno.

Pertengahan tahun 1930an, aktifitas desainnya mulai menurun, oleh kesibukannya sebagai rektor T.H. Bandoeng. Namun demikian ia masih sempat melahirkan karya terbaiknya, Villa Isola yang sekarang digunakan sebagai rektorat Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia, semenjak saat itu aktifitas Schoemaker terhenti, baik sebagai dosen arsitektur maupun arsitek.

Schoemaker tutup usia tahun 1949 di Bandung. Hingga akhir hayatnya, ia tetap menjalin komunikasi melalui surat dengan mantan mahasiswanya, Presiden Sukarno.

68 gedung hasil karyanya —sebagian besar berlokasi di Bandung, sisanya di Surabaya, Jakarta dan Semarang— menghiasi khazanah arsitektur Indonesia. Bukanlah suatu jumlah yang sedikit, malahan produktifitasnya tersebut hanya dapat didekati oleh Thomas Karsten di Semarang. Bagi yang jeli melihat peluang, dapat diselenggarakan wisata *heritage* meninjau bangunan-bangunan karya Schoemaker, seperti yang dilakukan terhadap karya-karya Frank Lloyd Wright di Amerika Serikat. Bahkan bagi yang tidak terlalu berminat pada arsitektur pun, pesona kepribadian Schoemaker yang unik tetap dapat dijadikan *selling point* bagi wisata jenis ini. Seiring meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai historis kota, mengapa tidak?

WARA WIRI DARI HLM. 9 JALAN-JALAN KE PULAU...

pohon *mangrove* yang baru ditanam. Mudah-mudahan dapat tumbuh besar sehingga selain memperindah kawasan juga dapat menahan pengkisan ombak ke pantai.

Pulau Panggang



Industri Perahu di Pulau Panggang

Siangnya, bersama pak Ajis Adjmain saya menyeberang ke pulau Panggang untuk melihat pulau yang terkenal karena kepadatan penduduknya tersebut. Konon menurut

sumber-sumber yang bisa dipercaya, kepadatan pulau panggang yang mencapai 364 jiwa/ha pada tahun 2001 menduduki urutan ketiga dalam daftar tempat-tempat yang paling padat penduduknya di dunia.

Kami berangkat menggunakan angkutan “ojek”. Ojek di sini juga ojek khas “orang pulau” berupa perahu bermotor rancangan setempat, berukuran kecil yang dapat ditumpangi maksimal 10 orang. Kemudinya menggunakan semacam mobil, yang dihubungkan dengan mesin menggunakan tali. Kecepatan ojek tersebut sama sekali tidak tinggi, tapi justru disitulah seninya. Sepanjang perjalanan terlihat gerombolan ikan bermain di karang dan seputar kapal. Ikan-ikan laut yang elok-elok, yang di toko aquarium di Bandung dihargai puluhan ribu. Wah! Lebih kaget lagi mendengar cerita pak Ajis, bahwa pedagang ikan membeli ikan tersebut dari tangan penduduk seharga Rp 500,00. Ternyata setelah melalui rantai distribusi yang lumayan ruwet, harga ikan tersebut menjadi melangit sesampai di toko ikan di “darat”.

Pulau Panggang merupakan kontras dari Pulau Pramuka. Dengan penduduk yang begitu padat, hanya tersisa sedikit ruang bagi penduduk untuk berinteraksi. Luasnya lebih kecil dibanding dibanding pulau Pramuka, hanya 9 hektar, namun dengan penduduk yang jumlahnya tiga kali lipat lebih besar.

Hanya tersisa lahan lapang di bagian selatan pulau, yang sebagian digunakan oleh pengrajin-pengrajin kayu terampil yang mendirikan industri pembuatan kapal dan perahu. Cukup menarik menyaksikan ketelatenan mereka, bagaimana memanaskan dan membengkokkan kayu sesuai dengan kerangka kapal yang dikehendaki. Namanya saja kampung nelayan, selain terdapat industri perahu, di sekitarnya juga terdapat beberapa “bengkel” reparasi jaring penangkap ikan. Di bagian paling selatan terdapat tiga buah *cottage* wisata berpenampilan elok berbahan kayu yang sudah tidak pernah dipergunakan lagi. Sayang, seharusnya saya bisa tinggal di situ untuk menikmati udara pantai yang nyaman.

Perjalanan kembali ke Jakarta juga merupakan pengalaman yang menyenangkan. Berhubung jika menunggu kapal Bandar Jakarta I merapat lagi akan makan waktu beberapa hari, saya memilih kembali menggunakan kapal angkutan rakyat yang jauh lebih sederhana, menuju pelabuhan Muara Angke. Kapal kayu bermesin kecil dengan kapasitas angkut 8 ton tersebut tentu saja lebih “oleng” dipergunakan gelombang. Tapi seluruh penumpang nampak ceria menjalaninya, tanpa memperdulikan pakaian yang basah dijilat gelombang. Musik yang dimainkan salah seorang penumpang melalui *tape recorder* yang dibawanya, melagukan tembang The Beatles, *Octopus Garden*;

*I'd like to be under the sea
in an Octopus garden in the shade...
We would be warm below the storm
In a little hide away beneath the waves
(lies beneath the ocean waves)...*



WARTA PARIWISATA—Pusat Penelitian Kepariwisataan
Institut Teknologi Bandung
Villa Merah—JI Tamansari 78
Bandung 40132

Telp: (022) 2534272 Fax: (022) 2506285
Email: p2par@elga.net.id

WACANA

DARI HLM. 3 PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN PARIWISATA...

dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya Dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational* dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Kepustakaan

Bater, J. et al. (2001) *Planning for Local Level: Sustainable Tourism Development*, Canadian Universities Consortium: Urban Environmental Management Project Training & Technology Transfer Program, Canadian International Development Agency (CIDA).